

**LAPORAN TAHUNAN
PENELITIAN PENGUATAN**



**MODEL PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI
PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL BERBASIS
KELEMBAGAAN LOKAL PADA PEREMPUAN BURUH
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KOPI
DI KABUPATEN JEMBER**

Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun

Tim Peneliti:

Ketua : Dra. Hj. Khutobah., M.Pd (NIDN: 0003105608)
Anggota : Drs. H. Misno A.L., M.Pd (NIDN: 0013085503)
Deditiani Tri Indrianti, S.Pd.,M.Sc (NIDN: 0017057912)

UNIVERSITAS JEMBER
Desember 2013

RINGKASAN

Penelitian ini dilaksanakan di PDP Sumberwadung, Kabupaten Jember. Tujuannya untuk merumuskan model penanggulangan kemiskinan yang memanfaatkan dan mengembangkan kelembagaan lokal dengan mengkaji kebutuhan strategis gender melalui program keaksaraan fungsional guna menyelesaikan masalah kemiskinan. Fokus kajian penelitian dilatarbelakangi adanya kondisi bahwa perempuan buruh perkebunan merupakan korban pertama dan utama kemiskinan akibat konstruksi sosial budaya. Oleh karena itu, perlu model penanggulangan kemiskinan yang lebih memberikan ruang gerak perempuan tanpa terjadi pengingkaran budaya. Model penanggulangan kemiskinan yang dihasilkan dari kegiatan penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi aplikatif bagi para penentu kebijakan dalam menyelesaikan kemiskinan di Daerah Perkebunan Kopi. Mengingat, Jember merupakan penghasil kopi yang mampu menyumbang devisa cukup besar, namun hal tersebut belum berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan

Data penelitian yang dikumpulkan pada kegiatan penelitian ini bersifat primer dan skunder, untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif (*mix metode*). Sampel diambil secara *sensus* dan wawancara mendalam serta pengamatan terlibat. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner dan pedoman wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi kelembagaan lokal yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat mampu menjadi media dalam mempercepat gerakan pemberantasan buta aksara. Namun demikian, sebagian besar masyarakat perkebunan tidak mengetahui keberadaan kelembagaan lokal tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya keterbibatan masyarakat dalam kegiatan kelembagaan lokal, yang disebabkan dominasi perusahaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perempuan perkebunan memiliki tingkat keberdayaan yang tinggi dalam menyangga kehidupan ekonomi keluarga yang diakomodir dalam kegiatan kelembagaan masyarakat. Hal tersebut juga berpotensi dalam keberlanjutan kegiatan program keaksaraan fungsional dalam rangka mempercepat gerakan pemberantasan buta aksara yang banyak terjadi pada perempuan perkebunan.

Kata kunci: *Kemiskinan, Perempuan Buruh, Keaksaraan Fungsional*

PRAKATA

Ungkapan syukur Alhamdulillah patut kami panjatkan, karena hanya dengan limpahan Rahmad serta Hidayanya lah penelitian dengan judul judul ”*Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keaksaraan Fungsional Berbasis Kelembagaan Lokal Pada Perempuan Buruh Perusahaan Daerah Perkebunan Kopi Di Kabupaten Jember*” dapat terlaksana, sehingga peneliti dapat menyusun laporan akhir.

Kami menyadari terdapat keterbatasan untuk melakukan penelitian lapangan maupun dalam penulisan laporan. Oleh karenanya, kritik dan saran membangun sangat kami harapkan guna perbaikan penelitian yang kami lakukan. Selain itu, ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Drs. Moh. Hasan., Ph.D, selaku Rektor Universitas Jember
2. Prof. Ir. Achmad Subagio., M.Arg. Ph.D, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember
3. Prof. Dr. Sunardi., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember
4. Anggota tim peneliti, tim *field worker*, para informan, para responden serta aparat pemerintah Kabupaten Jember, sehingga penelitian ini mengalami perkembangan dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi upaya pembangunan masyarakat dengan model pemberdayaan melalui program keaksaraan fungsional terutama untuk meningkatkan keberdayaan perempuan di perkebunan. Dimana, selama ini keberdayaan perempuan perkebunan dibelenggu oleh sistem sosial di tingkat lokal.

Jember, 16 Desember 2013
Ketua Tim Peneliti,

Dra.Hj. Khutobah., M.Pd
NIP.19561003 198212 2 001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Ringkasan.....	iii
Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Program Keaksaraan Fungsional Sebagai Upaya Penyadaran Kritis.....	4
2.2 Ketimpangan Gender Pada Masyarakat Perkebunan Kopi.....	5
2.3 Potensi Kelembagaan Lokal pada Masyarakat Perkebunan.....	6
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	7
3.1 Tujuan Penelitian.....	7
3.2 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 4. METODE PENELITIAN.....	8
4.1 Diagram Alir Penelitian	8
4.2 Rancangan Penelitian.....	9
4.3 Metode Dasar.....	9
4.4 Lokasi Penelitian.....	10
4.5 Teknik Pengambilan Sampel Penelitian.....	10
4.6 Teknik Pengumpulan Data.....	10
4.7 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	11
4.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	11
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
5.1. Kondisi Geografis Kabupaten Jember.....	16
5.2. Kondisi Demografi.....	17
5.3. Struktur Sosial dan Ekonomi Masyarakat.....	18
5.4. Lembaga Formal Masyarakat.....	18
5.5. Kelembagaan Sosial Masyarakat PDP Sumber Wadung.....	19
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	22
6.1. Penelitian yang direncanakan oleh Tim Peneliti.....	22
6.2. Arah Kegiatan Lanjutan Setelah penelitian di Lakukan.....	22
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN.....	24
7.1 Kesimpulan.....	24
7.2 Saran.....	24

LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Jember memiliki Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) yang potensial untuk mengembangkan tanaman kopi. Bahkan, komoditi yang dihasilkan dari sektor pekebunan kopi mampu menyumbang devisa cukup besar bagi negara (Profil Kabupaten Jember, 2012). Namun, potensi sumberdaya alam tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakatnya. Mengingat, sebagian besar masyarakat perkebunan kopi masih berada di bawah garis kemiskinan. Sebagaimana kondisi masyarakat PDP Sumberwadung di Kabupaten Jember. Dimana, kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya masih tergolong keluarga prasejahtera. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya tempat tinggal yang kurang memadai serta upah kerja yang masih di bawah rata-rata.

Kondisi sosial tersebut mendorong perempuan di PDP Sumberwadung untuk bekerja sebagai buruh. Hal itu, merupakan bentuk strategi adaptasi dalam menanggulangi tekanan ekonomi untuk keluar dari masalah kemiskinan. Namun demikian, perempuan buruh memiliki tingkat keberdayaan relatif cukup rendah dibanding laki-laki. Akibatnya, perempuan buruh sering mendapat perlakuan diskriminatif, eksploitasi, resiko kerja yang buruk, upah kerja kurang layak, serta pelecehan seksual. Untuk itu perlu adanya penyadaran kritis terhadap perempuan buruh perkebunan, sehingga memiliki kemampuan memperoleh akses terhadap sumber-sumber yang berpengaruh terhadap kebutuhan hidup. Hal tersebut dapat dilakukan melalui program keaksaraan fungsional yang memberikan ruang gerak terhadap perempuan, sehingga jangka panjang perempuan buruh perkebunan kopi lebih memiliki kapasitas diri dan untuk lebih mandiri.

Namun demikian, upaya peningkatan kesadaran kritis pada perempuan buruh perkebunan kopi melalui program keaksaraan fungsional belum maksimal apabila mengabaikan karakteristik sosial budaya yang telah melembaga dalam sistem sosial di tingkat lokal. Perhatian ini didasari oleh pertimbangan bahwa, masyarakat perkebunan memiliki tatanan sosial sebagai wujud interkoneksi

antara berbagai sendi kehidupan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Amin (2005:172), bahwa masyarakat yang mendiami suatu bentang ruang tertentu dengan kelembagaan dan sistem kepercayaan yang beragam, serta sumber daya alam dan kondisi lingkungan hidup, semuanya mesti dilihat dari satu kesatuan.

Mengingat, kelembagaan masyarakat terbentuk dari tradisi komunitarian berdasarkan kepentingan kolektif serta memiliki fungsi sebagai sistem pengendali sosial. Keberadaannya pun lebih bersifat adaptif serta lebih mampu menjawab kebutuhan perempuan buruh perkebunan yang lebih spesifik. Sebagaimana diungkapkan Sugiyanto (2002:59), bahwa lembaga sosial dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) disaat komunitas lokal berada pada kondisi krisis, sehingga dapat menjamin stabilitas kelangsungan hidup masyarakat, terbentuk atas kepentingan kolektif, serta menyediakan peran sosial yang sesuai norma dan karakteristik masyarakat di tingkat lokal, sehingga perempuan bersama laki-laki lebih kritis dan mampu merespon kebutuhan lokal yang dapat mempengaruhi kehidupannya tanpa terjadi pengingkaran budaya.

Dari uraian di atas, tergambar bahwa penanggulangan kemiskinan melalui program keaksaraan fungsional perlu diformulasi berdasarkan potensi kelembagaan di tingkat lokal guna mewujudkan kesadaran kritis perempuan buruh perkebunan. Mengingat, ketidakberdayaan perempuan terjadi akibat ketidakadilan gender di tingkat lokal maupun global yang telah melembaga dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, perempuan memiliki posisi tawar rendah, kultur yang represif, diskriminasi di ruang publik maupun domestik (Anonim:2005:4).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hendak mengkaji kelembagaan masyarakat lokal yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan dalam meningkatkan keberdayaan perempuan buruh perkebunan kopi. Hal ini berguna untuk menyelaraskan program keaksaraan fungsional dengan tatanan masyarakat yang telah melembaga serta terorganisir. Oleh karena itu, pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah potensi kelembagaan masyarakat yang kondusif untuk dimanfaatkan dan dikembangkan dalam program keaksaraan fungsional sebagai upaya meningkatkan keberdayaan perempuan buruh pada perusahaan daerah perkebunan kopi di Sumberwadung Kabupaten Jember dan sesuai dengan kebutuhan strategis gender?
- 2) Bagaimanakah tingkat keberdayaan laki-laki maupun perempuan di ranah domestik dan publik dalam menghadapi tekanan ekonomi guna keluar dari masalah kemiskinan pada masyarakat perusahaan daerah perkebunan kopi di Sumberwadung Kabupaten Jember?



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Program Keaksaraan Fungsional Sebagai Upaya Penyadaran Kritis

Buta aksara dan ketidakberdayaan perempuan buruh perkebunan kopi bukan lagi merupakan fenomena sosial, tetapi merupakan masalah kemanusiaan terkait kemiskinan. Oleh karena itu, perlu kebijakan komprehensif dan menyeluruh yang dilakukan secara regional maupun nasional guna menyelesaikan kemiskinan. Tujuannya, membentuk masyarakat kritis yang mampu merespon situasi yang berpengaruh sebagai sumber-sumber kelangsungan hidup yang merupakan instrumen dalam memperbaiki kehidupan perempuan buruh.

Bagi Freire (dalam Smith:2001), bahwa upaya penyadaran pada akhirnya bermuara pada pembebasan yang diimplementasikan dengan menggali, mempertahankan dan mengembangkan modal sosial, termasuk kearifan lokal. Nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial, wawasan kebangsaan, dan gotong royong, dioptimalkan sebagai modal dasar dalam menciptakan tanggung jawab sosial. Hal tersebut dapat dilakukan melalui program keaksaraan fungsional, sebagai program pemberdayaan yang mengkombinasikan kegiatan belajar bingarcalistung (berbicara, mendengar, membaca, menulis, dan berhitung), dan keterampilan fungsional. Dimana tujuan program keaksaraan fungsional menyupayakan kemampuan pemahaman dan penyesuaian diri guna mengatasi masalah hidup serta membangun masyarakat untuk melakukan perubahan.

Untuk itu, program keaksaraan fungsional perlu dilihat, dianalisis, dan dipahami dalam kerangka penyadaran kritis. Perubahan yang ingin dicapai adalah tumbuhnya masyarakat gemar belajar. Di mana terdapat perubahan dari situasi kehidupan masyarakat parsial menuju kehidupan yang berencana (*planning society*). Menurut Sudjana (2004: 279) ciri masyarakat belajar adalah: *pertama*, masyarakat gemar mencari informasi guna memenuhi kehidupannya. *Kedua*, masyarakat gemar menemukan informasi. *Ketiga*, masyarakat gemar menulis dan menyampaikan informasi, dan *keempat* masyarakat gemar melakukan kegiatan belajar secara berkelanjutan atas kesadaran bahwa belajar bagian dari kehidupan, sehingga perlu proses pembelajaran yang responsif dan sesuai konteks sosial

2.2. Ketimpangan Gender Pada Masyarakat Perkebunan Kopi

Posisi dan peran perempuan buruh sebagai aktor penggerak produktifitas perkebunan terbatas, termarginal ataupun asimetris dibandingkan laki-laki. Posisi yang diberikan relatif kecil dan tidak adil. Bahkan, secara khusus perempuan buruh lebih sedikit memperoleh sumber daya material, status sosial, kekuasaan dan aktualisasi diri dibanding laki-laki. Secara rinci keberdayaan perempuan buruh perkebunan kopi dapat dikaji dalam beberapa hal, antara lain; *Pertama, akses*. Dimana posisi perempuan buruh guna meningkatkan produktifitas perusahaan besar. Tetapi memiliki keterbatasan ruang gerak dalam mengakses sumber daya yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Kedua, Partisipasi. Keterlibatan perempuan buruh perkebunan dalam sektor publik dan domestik belum maksimal. *Ketiga, Kontrol Sosial*. Dimana perempuan memiliki kontrol sosial lebih kecil dibanding laki-laki untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. *Keempat, kesetaraan*. Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender yang berbentuk: 1) *Stereotype*, yaitu pandangan negatif terhadap relasi gender yang menyebabkan ketidakadilan. 2) *Subordinasi*, yaitu keyakinan bahwa kedudukan laki-laki dianggap lebih penting dan lebih utama. 3) *Marginalisasi*, yaitu proses peminggiran dan ketidakadilan perempuan akibat perbedaan jenis kelamin. 4) *Kekerasan*, yaitu bentuk kekerasan yang tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga menyangkut psikis, sehingga laki-laki atau perempuan mengalami gejala emosional dan ketidaktenangan batin. 5) *Beban ganda*, yaitu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam menjalankan beban kerja antara laki-laki dan perempuan (Anomin: 2005; 34-35).

Ketidakadilan atau ketimpangan gender oleh Fakih (1996: 35) disebabkan karena perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya dilihat secara biologis (*nature*) tetapi lebih dilihat dari kepribadian yang ditentukan masyarakat (*nurture*), sehingga secara situasional perempuan dianggap sebagai makhluk lemah dan kurang mampu memenuhi kebutuhannya, laki-laki dianggap lebih kuat dan lebih mampu. Untuk itu, perlu adanya upaya penyadaran guna mengurangi ketidakadilan gender dalam masyarakat sesuai karakteristik ditingkat lokal.

2.3 Potensi Kelembagaan Lokal pada Masyarakat Perkebunan

Kelembagaan lokal memiliki potensi yang tidak hanya menyangkut sumber ekonomi, tetapi juga perangkat institusi sosial yang melembaga sebagai wujud kecerdasan lokal (*local genius*) dalam memenuhi kebutuhan. Sebagaimana dikatakan Sugiyanto (2002;27), bahwa tatanan masyarakat tumbuh akibat tingkahlaku yang diulang guna memenuhi kebutuhan dan melekat pada pola kehidupan masyarakat. Dimana keberadaan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal dapat membangkitkan martabat kaum lemah, menghambat internalisasi ketidakadilan, dan menciptakan berbagai saluran bagi kelompok terpinggir untuk bersuara dan membuat perubahan yang berarti (Anonim: 2006:79). Oleh karena itu kelembagaan masyarakat efektif guna meningkatkan keberdayaan perempuan.

Menurut Sugiyanto (2002;38) kelembagaan masyarakat diartikan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan dan memiliki anggota yang berkembang secara dinamis melalui dimensi kehidupan masyarakat. Secara abstrak lembaga sosial merupakan peraturan atau norma untuk mengatur persoalan dan perilaku anggotanya. Koentjaraningrat dalam Soekanto (1990: 217), mengatakan lembaga masyarakat sebagai sistem tata kelakuan dan hubungan berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Kelembagaan masyarakat pada umumnya terbentuk dari ikatan social guna menciptakan kesepakatan sosial yang mengikat.

Oleh karena itu, kelembagaan masyarakat ditingkat lokal penting untuk dipertimbangkan guna dijadikan sarana melakukan penyadaran kepada perempuan buruh perkebunan. Dimana penyadaran dilakukan sebagai awal untuk memberikan kapasitas untuk kemudian didayagunakan dalam melakukan akses terhadap berbagai sumber kehidupan. Untuk itu, dalam penelitian ini tergambar pentingnya program keaksaraan fungsional berbasis kelembagaan lokal yang bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan guna menyelesaikan masalah kemiskinan pada masyarakat perusahaan daerah perkebunan kopi. Dimana kompleksitas interaksi sosial dan alam dalam kehidupan bermasyarakat menghasilkan pola fenomenal dan spesifik lokal, sehingga perempuan menjadi manusia kritis dan menjadi lebih peka dalam menghadapi berbagai tekanan social.

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas, penelitian ini mengandung tujuan teoritis dan tujuan praktis, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia untuk merumuskan model penanggulangan kemiskinan melalui program keaksaraan fungsional dengan mengembangkan dan memanfaatkan kelembagaan di tingkat lokal.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan secara aktual dan penting, mengenai hubungan kelembagaan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan keberdayaan perempuan sebagai korban utama kemiskinan. Penelitian ini akan memberi hasil yang berguna sebagai bahan masukan bagi praktisi, sehingga dapat menjadi acuan dalam merumuskan model penanggulangan kemiskinan yang tepat dan mendasar. Khususnya bagi masyarakat di daerah perkebunan kopi.

3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengungkap data yang memberikan informasi kondisi sosial budaya masyarakat perkebunan kopi, sehingga dapat merumuskan model penanggulangan kemiskinan melalui program keaksaraan fungsional pada perempuan buruh perusahaan perkebunan kopi dengan cara memanfaatkan dan mengembangkan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal. Model tersebut akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sebab upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan atas dasar karakteristik sosial budaya lokal. Mengingat, persoalan kemiskinan di perkebunan terjadi karena adanya ketimpangan gender. Dimana secara kebetulan perempuan menjadi korban pertama dan utama. Selain itu, penelitian ini merefleksikan berbagai teori kemiskinan dan pemberdayaan guna memberi kontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kualitas perkebunan kopi. Khususnya di perusahaan daerah perkebunan (PDP) kopi di Kabupaten Jember.

BAB 4. METODE PENELITIAN

4.1 Diagram Alir Penelitan (*fishbone diagram*)

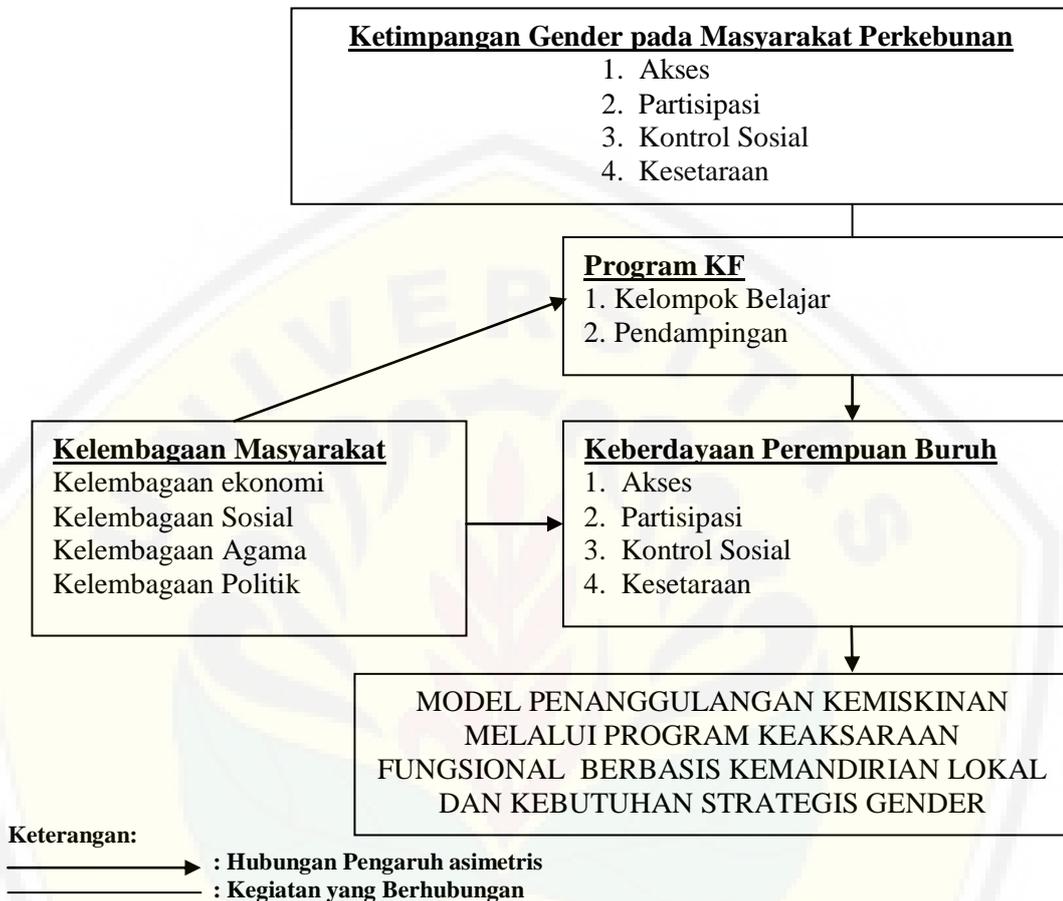
Penelitian ini akan difokuskan pada penecahan masalah yang dihadapi oleh perempuan buruh pada perusahaan daerah perkebunan kopi di Sumberwadung Kabupaten Jember. Dimana, pada tahun 1 peneliti akan mengkaji identifikasi potensi kelembagaan yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan dalam program keaksaraan fungsional guna merumuskan model penanggulangan kemiskinan. Selain itu peneliti juga mengidentifikasi tingkat keberdaaan perempuan buruh dan laki-laki di ranah domestik dan publik. Pada tahun ke 2 penelitian mengkaji hubungan antara program keaksaraan fungsional dengan kelembagaan masyarakat ditingkat lokal guna menanggulangi kemiskinan. Sedangkan, pada tahun ke 3 penelitian akan menghasilkan rumusan penanggulangan kemiskinan melalui program keaksaraan fungsional berbasis kelembagaan lokal pada perempuan buruh perkebunan kopi. Adapun alur penelitian dirumuskan dalam diagram *fishbone* dibawah ini:



Gambar 4.1
Alur Penelitian selama 3 tahun

4.2. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang selama tiga tahun. Akan tetapi pada tahun pertama rancangan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:



Gambar 4.2.
Rancangan Penelitian Tahun 1

4.3 Metode Dasar

Kerangka besar penelitian ini menggunakan *deskriptif eksplanasi* dengan menggabungkan data kualitatif dan data kuantitatif (*mix metode*) dimana data kuantitatif mendukung data kualitatif. Data yang diperoleh akan menjelaskan fenomena sosial terkait potensi kelembagaan masyarakat yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan pada program keaksaraan fungsional pada perempuan buruh perkebunan kopi. Penelitian dilengkapi dengan pedoman wawancara dan didukung oleh metode *survey*.

4.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumberwadung Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi didasarkan pada data yang dihimpun BPS dan Bappeda Jember, bahwa PDP Sumberwadung merupakan Perusahaan Daerah Perkebunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan hasil produksi kopi terbesar yaitu 5,99 ton dibandingkan produktivitas tanaman kopi yang dikelola oleh PTPN dengan hasil 4,09 ton perhektarnya (Jember dalam angka: 2011). Namun, memiliki masyarakat dengan tingkat buta aksara yang masih cukup besar.

4.5 Teknik pengambilan Sampel Penelitian

Sampel penelitian ditentukan secara sensus. Dimana responden diambil secara keseluruhan dengan kategori buruh laki-laki dan perempuan yang berdomisili di PDP sumberwadung Kabupaten Jember.

4.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik:

1. Wawancara, pertanyaan yang diajukan kepada informan guna menggali informasi potensi kelembagaan masyarakat dan keberdayaan laki-laki serta perempuan.
2. Kuesioner, merupakan daftar pertanyaan untuk dijawab responden dan berhubungan dengan tujuan penelitian (pada bab 1).
3. Observasi, dilakukan untuk mengamati kelembagaan lokal yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan pada program keaksaraan fungsional, seta mengobservasi kegiatan perempuan di ranah domestik maupun publik terkait dengan kehidupan masyarakat perkebunan.
4. Pencatatan laporan atau dokumentasi yang berhubungan dengan gambaran kondisi masyarakat perkebunan dan keadaan geososial PDP Sumberwadung.
5. Studi pustaka, data yang diperoleh dari referensi buku yang terkait dengan tujuan penelitian.

4.7 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel yang menjadi focus kajian, antara lain sebagai berikut:

1. Program keaksaraan fungsional adalah kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dalam memfasilitasi perempuan buruh perkebunan sehingga memiliki kesadaran kritis.
2. Kelembagaan lokal adalah tatanan masyarakat yang telah terorganisir dan potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan pada program keaksaraan fungsional pada perempuan buruh perkebunan.

4.8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data primer dan skunder terkumpul, maka dilakukan:

A. Pengolahan data

Secara keseluruhan data yang didapat diolah dengan teknik *snowball*. Teknik yang dilakukan sebagai berikut:

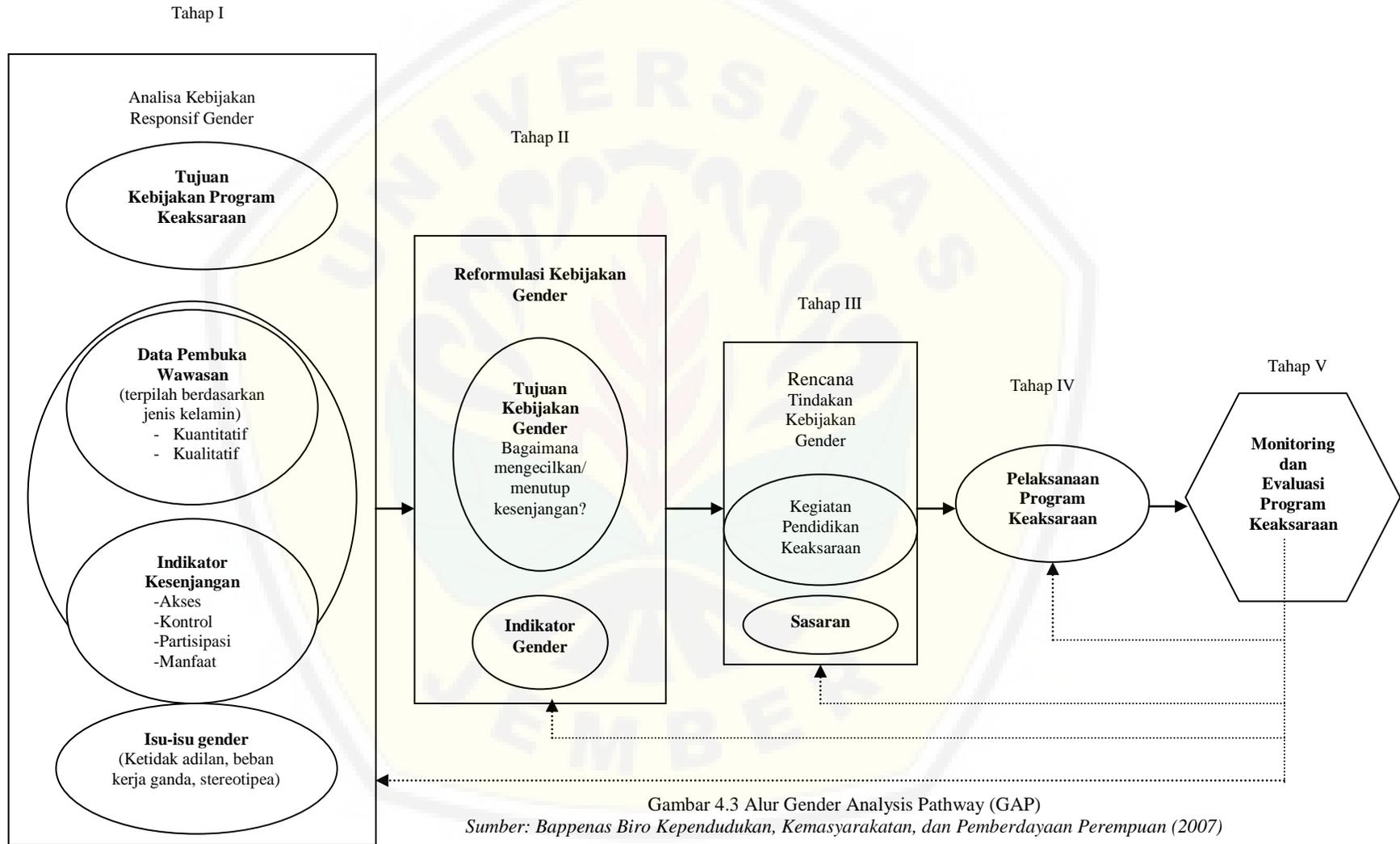
- a. *Editing*, yaitu cara meneliti kembali data yang terkumpul melalui wawancara. Tahap tersebut dilakukan terhadap jawaban yang telah ada dalam wawancara melalui kuesioner.
- b. *Coding*, yaitu upaya untuk menyederhanakan data dengan memberi simbol pada jawaban responden.
- c. *Peta Matrik*, yaitu diagram yang dibuat untuk mempermudah melakukan kajian terhadap kerangka kerja analisis gender. Dalam hal ini data yang dikumpulkan terkait dengan profil kegiatan, profil akses dan kontrol, analisis faktor dan kecenderungan, serta analisis daur program. Model analisis GAP (*gender analysis pathway*) dipilih untuk melakukan analisis gender. Di mana GAP adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh perempuan dalam kegiatan domestik dan publik

B. Teknik Analisis data

Setelah data primer maupun sekunder terkumpul, maka langkah pertama adalah melakukan analisis data dengan teknik GAP. Langkah yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Menganalisis tujuan program keaksaraan fungsional yang tertulis dalam pedoman umum, petunjuk teknis operasional, dan berbagai dokumen yang menjadi *record* kegiatan program keaksaraan fungsional serta kegiatan perempuan buruh di ranah publik dan domestik.
- 2) *Eye Opener* data. Penyajian data masing-masing sektor menurut kategori usia dalam keaksaraan fungsional untuk melihat adanya tingkat buta huruf kaum perempuan buruh di PDP Sumberwadung Kabupaten Jember
- 3) Analisis faktor kesenjangan, untuk menganalisis ketimpangan gender menurut jenis kelamin, sehingga ditemukan faktor yang menjelaskan potensi kelembagaan masyarakat pada kegiatan di sector publik dan domestik guna menanggulangi kemiskinan pada perempuan buruh perkebunan kopi.
- 4) Analisis isu kemiskinan yang terjadi pada perempuan buruh perkebunan kopi pada kegiatan perusahaan daerah perkebunan. Kebijakan yang ada data pendidikan, serta faktor kesenjangan pendidikan selanjutnya dirumuskan isu kebijakan pendidikan sebagai bahan untuk memformat konsep mengenai model penanggulangan kemiskinan melalui program keaksaraan fungsional.
- 5) Indikator program keaksaraan fungsional dirumuskan dan sebelumnya diukur dampak positif bagi terwujudkan keseimbangan dan keadilan perempuan buruh.

Berikut bagan alir gender analysis pathway dapat terlihat pada bagan 4.3



Gambar 4.3 Alur Gender Analysis Pathway (GAP)
Sumber: Bappenas Biro Kependudukan, Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan (2007)

Uji Hopotesa

Hipotesa 1:

1. Untuk mengidentifikasi potensi kelembagaan masyarakat ditingkat lokal dalam program keaksaraan fungsional guna menanggulangi kemiskinan perempuan buruh, maka digunakan analisa deskriptif eksplanatif menggunakan SPSS seri 16 dimana:

Ho ditolak jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, terdapat kelembagaan masyarakat yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam kegiatan program keaksaraan fungsional sebagai upaya menanggulangi kemiskinan

Ho diterima jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, berarti tidak terdapat terdapat kelembagaan masyarakat yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam kegiatan program kegiatan program keaksaraan fungsional sebagai upaya menanggulangi kemiskinan

2. Uji triangulasi, untuk menguji data wawancara guna mengidentifikasi potensi Kelembagaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan strategis gender.

Hipotesa 2:

1. Uji Statistik, untuk mengidentifikasi tingkat keberdayaan laki-laki dan perempuan dalam menghadapi tekanan ekonomi pada masyarakat perkebunan, maka digunakan uji korelasi parsial (uji F). Dimana kreteria pengujian:

Ho : ditolak jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$: secara bersama-sama variabel dependen mempengaruhi variabel independen secara signifikan

Ho : diterima jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$: secara bersama-sama variabel dependen tidak berpengaruh terhadap variabel independen secara signifikan

Sebelum data dianalisis dengan menggunakan kedua teknik yang telah disebut di atas, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi penelitian:

1. Uji Normalitas, yaitu untuk mengetahui apakah antara variable yang diteliti mengikuti distribusi normal atau tidak
2. Uji linieritas, yaitu untuk mengetahui apakah antara variabel pengaruh yang linier dengan variabel terikat

2. Uji homogenitas, yaitu untuk mengetahui derajat perbedaan pada kelompok yang berbeda dalam memberikan data untuk variabel terikat dan diuji dengan menggunakan SPSS seri 16
3. Uji triangulasi, untuk menguji data wawancara guna mengidentifikasi tingkat keberdayaan laki-laki dan perempuan dalam menghadapi tekanan ekonomi pada masyarakat perkebunan.



BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kondisi Geografis Kabupaten Jember

Kabupaten Jember berada pada posisi koordinat $6^{\circ}27'9''$ sampai dengan $7^{\circ}14'35''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}59'6''$ sampai dengan $8^{\circ}33'56''$ Lintang Selatan. Selain itu Kabupaten Jember dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas wilayah karena memiliki karakter topografi berbukit hingga pegunungan disisi Utara dan Timur. Akan tetapi di daerah selatan dan tengah merupakan dataran ngarai yang subur. Luas wilayah yang dimilikinya sebesar 3.293,34 Km² atau 329.333,94 Ha. Namun demikian, tidak seluruh wilayah pedesaan di Kabupaten Jember memiliki kesuburan dan potensi daerah yang sama.

Secara agroklimatologi, Kabupaten Jember merupakan daerah subur yang potensial untuk kawasan pengembang sektor agribisnis dan agroindustri. Disisi lain, Kabupaten Jember merupakan daerah penghasil taman perkebunan, terutama kopi dan kakao. Daerah perkebunan yang terdapat di Kabupaten Jember tidak hanya dikelola oleh rakyat tetapi juga dikelola oleh pihak BUMN (PT Perkebunan Nusantara XII, dan PDP serta swasta. Dimana total area perkebunan kopi di Jember seluas 16.882 ha, yang terdiri dari perusahaan rakyat seluas 4.911 ha, 6.009 ha dikelola oleh PTPN XII, 2.267 ha dikelola oleh PDP dan 3,695 ha dikelola oleh pihak swasta. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.1.

Akan tetapi, produktifitas tanaman kopi dalam setiap hektarnya banyak dihasilkan oleh PDP, yaitu sebesar 5.99 ton. Sedangkan lahan kopi yang dihasilkan oleh PTPN XII sebesar 4.09 ton, dan pengelolaan swasta mencapai 5.24 ton. Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa PDP dalam hal ini perusahaan Sumberwadung memiliki kontribusi besar dalam ekspor kopi. Dimana dalam setiap tahunnya nilai dan volume ekspor tanaman kopi mencapai 2.419 ton atau 2.3 juta US\$.

Namun demikian, kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah PDP Sumberwadung masih tergolong miskin dibandingkan daerah lain yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Hal ini dilihat dari banyaknya keluarga yang masih tergolong prasejahtera karena alasan ekonomi. Selain itu, angka partisipasi sekolah di PDP Sumberwadung juga rendah

Tabel 5.1
Luas Panen, Rata-Rata Produksi, dan Produksi Kopi Menurut Kecamatan Tahun 2010

No	Kecamatan	Luas Area (Ha)				Produktivitas (kw/Ha)	Produksi (kw)
		TBM	TM	TT/TR	Total		
1	Kencong	-	-	-	-	-	-
2	Gumukmas	-	2.06	-	2.06	4.75	9.79
3	Puger	-	-	-	-	-	-
4	Wuluhan	-	2.91	1.20	4.11	4.87	14.17
5	Ambulu	0.93	4.24	0.17	5.34	4.93	20.90
6	Tempurejo	1.30	14.03	3.18	18.51	4.21	59.07
7	Silo	763.94	1.106.79	420.97	2.291.70	10.52	11.643.43
8	Mayang	19.60	39.94	-	59.54	5.50	219.67
9	Mumbulsari	14.68	31.33	1.32	47.21	4.95	155.08
10	Jenggawah	-	5.75	-	5.75	4.97	28.58
11	Ajung	1.99	0.52	0.10	2.61	4.75	2.47
12	Rambipuji	1.02	3.05	0.66	4.73	4.85	14.79
13	Balung	-	4.72	0.35	5.07	4.86	22.94
14	Umbulsari	1.27	2.01	3.17	6.45	4.89	9.83
15	Semoro	-	3.65	1.30	4.95	4.21	15.37
16	Jombang	-	-	-	-	-	-
17	Sumberbaru	64.42	213.17	15.41	293.00	4.76	1.014.69
18	Tanggul	72.35	174.01	12.11	258.47	4.58	796.97
19	Bangsalsari	24.63	99.69	1.17	125.49	4.43	441.63
20	Panti	41.52	337.97	9.60	389.09	4.55	1.537.76
21	Sukorambi	13.29	94.53	-	107.82	4.61	435.78
22	Arjasa	5.10	39.65	8.14	52.89	4.30	170.50
23	Pakusari	1.01	37.05	0.17	38.23	4.50	166.73
24	Kalisat	0.05	24.04	10.29	35.38	4.60	110.58
25	Ledokombo	200.91	320.81	14.47	536.19	5.45	1.748.41
26	Sumberjambe	130.59	340.27	115.16	586.02	5.37	1.827.25
27	Sukowono	2.09	36.25	0.15	38.49	4.81	174.36
28	Jelbuk	334.30	252.07	-	616.14	4.88	1.230.10
29	Kaliwates	3.50	2.17	-	5.67	4.56	9.90
30	Sumbersari	-	-	60.30	-	-	-
31	Patrang	7.05	41.18	-	60.30	4.85	199.72

(Sumber: Data BPS 2011)

Keterangan: TBM: Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR : Tanaman Tua

Dari tabel 5.1 dapat terlihat bahwa Kecamatan Silo merupakan daerah penghasil kopi terbesar di Kabupaten Jember. Area perkebunan kopi juga terluas, yaitu 763,94 dengan total produksi 11.643.43 kw/ ha setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa adalah daerah yang potensial.

Sebagai daerah kabupaten yang berada di bawah pemerintahan Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember terletak pada jarak 198 km dari Ibu Kota Propinsi. Sebelah utara Kabupaten Jember berbatasan langsung dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo, sebelah barat berbatasan dengan

Kabupaten Lumajang, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, dan wilayah selatan di batasi oleh Samudra Indonesia dengan pulau Nusa Barong merupakan satu-satunya pulau yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tempat wisata. Namun potensi tersebut belum menjadi fokus pembangunan untuk dikembangkan.

Selain itu, Kabupaten Jember berada pada letak yang strategis untuk mengembangkan potensi wilayah, karena berada dipersimpangan antara Surabaya dan Bali. Letak wilayah tersebut secara langsung berpengaruh dalam perkembangan ekonomi masyarakat yang cukup pesat untuk menjadi barometer pertumbuhan berbagai sektor di kawasan timur Propinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia semestinya fokus utama pembangunan.

5.2 Kondisi Demografi Penduduk

Pada dasarnya Kabupaten Jember tidak memiliki penduduk asli, dan hampir semua pendatang. Hal ini dimungkinkan karena Kabupaten Jember merupakan daerah yang mengalami perkembangan cukup pesat khususnya dibidang perkebunan, sehingga memberikan peluang bagi pendatang untuk berlomba-lomba mencari sumber penghidupan. Sebagaimana kondisi demografi penduduk di Kecamatan Silo, khususnya PDP Sumberwadung. Dimana sebagian besar penduduknya suku Madura. Kondisi tersebut tidak lepas dari sejarah munculnya perkebunan pada jaman penjajahan Belanda. Dimana suku madura didatangkan untuk menjadi tenaga kerja.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan data registrasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Jember tercatat sebanyak 2.329.929 jiwa, terdiri atas 1.186.163 jiwa perempuan dan 1.143.766 jiwa laki-laki. Adapun laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 sampai dengan 2010 sebesar 0,6321.

Secara mayoritas masyarakat di PDP Sumberwadung menjadi pekerja perkebunan. Dilihat dari tingkat pendidikannya, sumber daya manusia (SDM) PDP Sumberwadung masih tergolong relatif rendah dibandingkan daerah lain yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Jember. Hal ini tampak dari jumlah warga tributa sebanyak 115 jiwa.

5.3 Struktur Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Kabupaten Jember merupakan daerah agraris. Meskipun sektor perkebunan di Kabupaten Jember merupakan penyangga utama perekonomian, tetapi peran tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun secara perlahan tetapi pasti. Hal ini dapat dilihat dari perubahan peran sektor pertanian di tahun 2010 dan tahun 2011, bahwa peranan sektor perkebunan sebesar 45,09 persen dan 44,71%, selanjutnya dapat dilihat dari hasil observasi banyak perusahaan perkebunan yang telah mengubah tanaman perkebunan menjadi tanaman pertanian.

5.4 Lembaga Formal Masyarakat

Lembagan formal yang dibentuk pemerintah di PDP Sumberwadung belum berjalan secara maksimal. Organisasi bentukan pemerintah seperti PKK dan Posyandu berjalan hanya sebatas rutinitas. Kegiatan yang dilaksanakan belum memberikan kontribusi terhadap perubahan masyarakat. Disisi lain, keberadaan kedua lembaga ini memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan pembekalan ketrampilan maupun pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat. Sebagai perangkat organisasi pemerintahan desa, PKK memiliki program kerja yang disebut Dasa Wisma. Pertemuan rutin PKK dilakukan sebulan sekali dan anggota PKK adalah ibu-ibu rumah tangga (perempuan).

Selain organisasi PKK, di PDP Sumberwadung terdapat Posyandu (pos pelayanan terpadu) yang digerakkan oleh elit lokal perkebunan. Keberadaan lembaga posyandu di PDP Sumberwadung tidak lebih hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Mengingat, kegiatan yang dijalankan merupakan rutinitas terkait pemeriksaan kesehatan ibu dan balita. Kegiatan yang dilakukan antara lain: pemeriksaan gratis bagi ibu hamil dan balita, makan sehat dan penyuluhan yang bersifat *insidental*.

Dalam kegiatan posyandu maupun PKK pekerja perempuan belum nampak dilibatkan menjadi pengurus organisasi. Pekerja perempuan hanya masih menjadi sasaran program. Meskipun demikian, terdapat nilai manfaat dalam kegiatan tersebut. Dimana kebutuhan praktis perempuan dapat diperoleh dalam aktifitas kegiatan tersebut.

5.5 Potensi Kelembagaan Lokal di PDP Sumberwadung Untuk Dimanfaatkan dan Dikembangkan dalam Program Pendidikan Keaksaraan

Keaksaraan merupakan salah satu alat untuk melakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Selain itu, keaksaraan yang diwujudkan dalam program keaksaraan fungsional memiliki tujuan untuk meningkatkan keberdayaan pembelajar dalam memperoleh akses informasi tentang berbagai pilihan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Akan tetapi hal tersebut memerlukan kesesuaian konteks budaya masyarakat. Mengingat, masing-masing komunitas memiliki budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu penting kiranya bahwa program pendidikan keaksaraan memperhatikan budaya yang telah melembaga dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Keberadaan lembaga lokal yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat merupakan tatanan yang mengatur kehidupan masyarakat. Selain itu tatanan merupakan wujud interkoneksi yang memiliki kontribusi besar dalam melakukan gerakan pembangunan. Sebagaimana dalam program pendidikan keaksaraan fungsional yang merupakan gerakan pemberantasan buta aksara, maka pelaksanaannya memerlukan tatanan sosial sebagai basis menentukan keberhasilan program. Dimana dalam hal ini, proses pembelajaran yang hanya menekankan materi pembelajaran tidak akan memiliki fungsi bagi warga belajar.

1. Kelembagaan Agama

Pelapisan struktur masyarakat di PDP Sumberwadung juga terlihat dalam kegiatan keagamaan. Dimana kegiatan pengajian hanya diikuti oleh kelompok pekerja (buruh perkebunan). Kegiatan pengajian menjadi rutinitas yang dapat menjaga hubungan tali silaturahmi antar tetangga. Selain itu, kegiatan pengajian dilakukan untuk memanjatkan doa kepada para leluhur atau sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Namun demikian kegiatan tersebut belum memberikan pengaruh signifikan, hal ini ditunjukkan masih ditemukannya pengedar dan pembeli togel dalam komunitas tersebut.

Berdasarkan data yang telah dihimpun tergambar bahwa di di PDP Sumberwadung terdapat aturan agama yang diyakini dan dijalankan oleh

masyarakat sebagai dasar menanggulangi masalah dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dinyatakan oleh 80.4% responden. Data ini mengartikan bahwa segala aktifitas masyarakat memegang prinsip nilai-nilai agama. Hal ini dapat menjadi pintu masuk dalam program pendidikan keaksaraan fungsional. Dimana dalam ajaran agama terdapat petunjuk bahwa meningkatnya derajat manusia karena ilmu. Artinya, penyelenggara program keaksaraan fungsional dapat memberikan keyakinan tersebut kepada masyarakat yang kebetulan sebagai penyandang buta aksara. Untuk kemudian mengikuti aktifitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan kapasitas sebagai manusia.

Namun demikian masih ditemukan berbagaimacam aturan yang berlandaskan agama yang pada akhirnya membatasi gerak perempuan. Hal ini dinyatakan oleh 70,6 % responden. Akan tetapi, secara kualitatif perempuan buruh perkebunan di PDP sumber wadung memiliki ruang gerak yang cukup tinggi untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga. Selain itu, aktifitas perempuan dalam melakukan produktifitas perusahaan juga cukup besar.

Aktifitas perempuan dalam ranah publik pada aspek agama juga ditunjukkan oleh keterlibatan perempuan buruh perkebunan dalam kegiatan pengajian yang secara rutin dilakukan pada hari senin. Namun demikian, kegiatan pengajian belum memberikan akses informasi terkait sumber kehidupan perempuan di PDP Sumberwadung.

2. Kelembagaan Politik

Masuknya Lembaga Swadaya Masyarakat Sketsa (LSM Sketsa) pada komunitas masyarakat PDP Sumberwadung telah menggeser sistem politik masyarakat. Dimana terdapat peningkatan posisi tawar antara penguasa dan pekerja. LSM Sketsa melakukan pendampingan sekaligus advokasi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat PDP Sumberwadung. Sampai pada akhirnya membentuk serikat buruh untuk kemakmuran (SERBUK). Berbagai aktifitas telah dilakukan oleh SERBUK untuk memperjuangkan dan mengubah kesejahteraan masyarakat perkebunan. Aktifitas yang dilakukan antara lain: melakukan advokasi atas perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh penguasa, melakukan peningkatan pengetahuan dengan menyelenggarakan sekolah buruh.

Pada masyarakat PDP Sumberwadung, keberadaan lembaga ini sangat potensial untuk melakukan berbagai perubahan dalam mengakses sumber-sumber kehidupan. Mengingat, berbagai aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat perkebunan dibatasi oleh kebijakan penguasa yang bersifat individual tanpa dasar yang jelas. Namun, dukungan dan advokasi yang dilakukan oleh LSM Sketsa dapat mengubah kehidupan buruh perkebunan. Aktivitas yang dilakukan oleh SERBUK antara lain: menjalin komunikasi dengan anggota DPRD untuk melakukan perbaikan jalan dan perbaikan tempat tinggal, mengadakan kegiatan sekolah buruh. Melakukan advokasi kepada anggota yang mendapat masalah pekerjaan.

Banyak dampak positif yang dirasakan buruh perkebunan ketika tergabung dalam anggota komunitas SERBUK. Peningkatan nilai tawar buruh juga terjadi. Hal ini dapat dilihat adanya perubahan status dari buruh lepas menjadi buruh tetap. Dimana, status tersebut memiliki dampak pada fasilitas yang dapat diraih oleh buruh dan keluarganya, antara lain: jaminan kesehatan, penambahan fasilitas tempat huni, jaminan ekonomi. Dalam kegiatan ini, aktifitas perempuan bersama laki-laki juga nampak. Pada kegiatan yang dilakukan oleh SERBUK, perempuan ditempatkan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Bahkan perempuan mampu memobilisir rekan kerja untuk melakukan berbagai aksi untuk memperjuangkan hak yang semestinya diperoleh buruh.

Keberadaan SERBUK berkontribusi sebagai sumber informasi masyarakat perkebunan terkait hak dan kewajiban. Hal ini diungkapkan oleh 52,9% responden. Mengingat tidak semua masyarakat perkebunan menjadi anggota SERBUK. Selain itu melalui kegiatan organisasi SERBUK, perempuan dapat memperoleh akses informasi dan dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di daerah perkebunan dalam rangka meningkatkan kapasitas diri. Namun demikian kesempatan perempuan untuk terlibat menjadi pengurus organisasi masih terbatas. Hal ini ditunjukkan oleh adanya dominasi laki-laki dalam melakukan berbagai aktifitas yang dilakukan oleh SERBUK.

3. Kelembagaan Sosial

Keberadaan kelembagaan sosial dalam masyarakat perkebunan, seperti kematian, hajatan, dan kegiatan lainnya dapat menjadi sumber informasi. Dimana dalam kegiatan tersebut terdapat aturan yang dapat membantu kebutuhan masyarakat. Akan tetapi berbagai macam aturan yang terdapat dalam kelembagaan tersebut diyakini kebenarannya oleh masyarakat sekitar.

4. Kelembagaan Ekonomi

Mengingat masyarakat perkebunan adalah masyarakat yang tertutup, maka keberadaan kelembagaan ekonomi juga tidak semua lapisan masyarakat mengetahuinya. Hal ini disebabkan karena tidak semua masyarakat perkebunan mengikuti kegiatan kelembagaan ekonomi tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh 13,7 % responden yang mengatakan bahwa tidak ada aturan yang mengatur sistem ekonomi dalam masyarakat perkebunan. Meskipun keterlibatan atas peran serta laki-laki dan perempuan diputuskan secara bersama-sama.

Sistem ekonomi yang telah ada dalam masyarakat diyakini dapat meringankan kebutuhan masyarakat perkebunan. Mengingat sistem ekonomi muncul sebagai strategi kebutuhan ekonomi keluarga. Dimana perempuan dalam aktifitas ini dapat memperoleh sumber ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Akan tetapi antara laki-laki dan perempuan pada sistem ekonomi masyarakat perkebunan tidak memiliki aset rumah tangga. Aset yang dimiliki sejak awal diwariskan kepada anak hasil pernikahan.

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa berbagai aktifitas masyarakat yang telah melembaga memiliki dampak positif. Untuk itu, keberadaan lembaga kemasyarakatan yang ada dapat berpotensi menjadi media penyelenggaraan kegiatan program keaksaraan. Mengingat, program keaksaraan merupakan kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat akibat tidak mengenalnya aksara yang telah menjadi budaya masyarakat. Dimana saat ini tradisi masyarakat lesan telah berubah menjadi budaya aksara. Akan tetapi, berbagai aktifitas pembelajaran harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sesuai konteks lokal. Adapun strategi penyelenggaraan juga menyentuh kegiatan ekonomi, sebab penyandang buta aksara memiliki hubungan erat dengan kemiskinan.

5.6 Tingkat keberdayaan laki-laki dan PDP Sumberwadung

Secara umum, terdapat tiga peran perempuan di Indonesia yang dapat diidentifikasi, antara lain: rumah tangga dan pendapatan yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga, reproduksi dan produksi sosial yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan kesejahteraan anak, serta kerja sosial yang menunjang status keluarga (Mazdalifah: 2011, 19). Akan tetapi saat ini, banyak perempuan yang telah melakukan berbagai peran publik. Oleh karena itu, pendidikan menjadi hal utama.

Dilain pihak perempuan sangat dekat dengan kemiskinan. Hal ini akibat rendahnya angka partisipasi sekolah perempuan. Untuk membantu perempuan keluar dari kubang kemiskinan, maka diperlukan adanya peningkatan kualitas perempuan melalui program gerakan pemberantasan buta aksara. Mengingat, akses informasi memerlukan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Sebagaimana kondisi di PDP Sumberwadung, sebagian besar perempuan belum memiliki keterampilan tersebut. Bahkan kemampuan untuk mendengarkan dan berbicara Bahasa Indonesia juga masih minim, sehingga perempuan perkebunan tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh akses informasi yang terkait dengan sumber kehidupannya di luar kawasan perkebunan.

Selain rendahnya akses informasi, partisipasi perempuan dalam meningkatkan produktitas perusahaan dan peningkatan ekonomi keluarga cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan adanya realita bahwa, produktifitas kerja perusahaan yang dilihat dari jenis pekerjaan banyak dilakukan oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Akan tetapi perempuan lebih sedikit memperoleh manfaat dari hasil produksi perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Selain itu, semua buruh perempuan perkebunan juga harus menyelesaikan pekerjaan domestik (pekerjaan rumah tangga). Oleh karena itu, perempuan buruh harus mengkombinasi pekerjaan sebagai buruh diranah publik dan pekerjaan di ranah domestik sebagai ibu rumah tangga. Kondisi ini dapat menjadi gambaran untuk menyusun strategi pembelajaran dan menyusun materi ajar pada program keaksaraan fungsional agar sesuai dengan kebutuhan perempuan buruh perkebunan, sehingga berfungsi untuk menyelesaikan masalah kehidupannya.

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Kegiatan penelitian ini belum selesai dan masih dalam proses. Artinya, data yang dihimpun dan dianalisis merupakan data untuk melakukan pemetaan tahun pertama. Oleh sebab itu, tim peneliti akan melanjutkan proses penelitian untuk mendapatkan hasil maksimal sampai menemukan model penanggulangan kemiskinan melalui program keaksaraan fungsional yang sesuai dengan karakteristik budaya lokal.

Pada tahun kedua peneliti akan mencari hubungan antara kelembagaan lokal dan program keaksaraan fungsional untuk kemudian pada tahun ketiga peneliti mereformulasi kebijakan keaksaraan fungsional sehingga menghasilkan model. Sisa waktu efektif yang tersedia dalam melakukan penyempurnaan penelitian sebanyak 2 tahun, untuk itu tim peneliti akan memanfaatkan rentang waktu tersebut secara optimal, data yang dihimpun dapat dianalisis untuk kemudian dilaporkan.

Pada tahap rencana tindak lanjut, penelitian ini akan lebih menekankan proses pengolahan dan analisis data yang dihimpun secara mendalam melalui kuesioner dan wawancara. Hasil analisis data penelitian akan disajikan dalam laporan tahunan dan akhir penelitian. Sistematika kegiatan yang akan dilakukan untuk menyusun laporan tahunan dan akhir tersebut antara lain:

1. Melengkapi berbagai data yang telah dikumpulkan di lapangan antara lain data yang dihimpun melalui kuesioner dan wawancara jika memungkinkan dibutuhkan penambahan dan kesalahan data.
2. Melengkapi data tentang kelembagaan lokal yang menjadi fokus penelitian, hal ini dimungkinkan masih terdapatnya data yang masih belum ter gali dan berpotensi sebagai penghambat ataupun pendorong untuk meningkatkan keberdayaan perempuan .
3. Menggali data tentang kondisi social budaya masyarakat PDP Sumberwadung yang merupakan bagian wilayah perkebunan di Kabupaten Jember dan memiliki potensi untuk mengembangkan tanaman kopi sebagai komoditas utama Kabupaten Jember, namun masih menjadi salah satu kantong kemiskinan.

4. Menggali berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menanggulangi kemiskinan. Serta mengkaji pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Kabupaten Jember.
5. Menggali informasi lebih dalam tentang keberadaan sistem sosial di tingkat lokal yang menjadi ukuran kepastian masyarakat terkait kegiatan domestik dan publik yang dikerjakan perempuan maupun laki-laki.
6. Memperkuat literatur yang relevan dengan topik penelitian.
7. Menyiapkan poster dan penerbitan naskah hasil penelitian pada jurnal nasional
8. Menyusun buku literatur dan buku pedoman penyelenggaraan program keaksaraan fungsional.

Untuk memanfaatkan rentang waktu yang masih tersedia maka, secara prosedural penelitian ini akan akan dijadwalkan sebagaimana terdapat dalam jadwal pelaksanaan.

6.1. Penelitian yang direncanakan oleh tim peneliti adalah:

A. Tahun Kedua

Menghubungkan potensi kelembagaan masyarakat di tingkat lokal yang sesuai dengan kebutuhan strategis gender dengan program keaksaraan fungsional guna menyelesaikan masalah kemiskinan dan mewujudkan kedarasan kritis pada perempuan buruh perkebunan kopi

B. Tahun Ketiga

Merumuskan model penanggulangan kemiskinan melalui program keaksaraan fungsional berbasis kelembagaan lokal pada perempuan buruh perkebunan kopi.

6.2 Arah Kegiatan Lanjutan Setelah Penelitian dilakukan adalah:

1. Melakukan kajian terhadap penguatan kapasitas perempuan buruh perkebunan melalui program keaksaraan fungsional dalam menghadapi tekanan sosial ekonomi sebagai upaya menanggulangi kemiskinan.
2. Melakukan kajian dampak kegiatan program keaksaraan fungsional berbasis kelembagaan lokal terhadap tingkat keberdayaan perempuan buruh guna menghadapi masalah kemiskinan.

7. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Tulisan yang sampai saat ini dapat disusun berupa laporan tahunan Hibah Penguatan Tahun Anggaran 2013, dengan judul "*Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keaksaraan Fungsional Berbasis Kelembagaan Lokal Pada Perempuan Buruh Perusahaan Daerah Perkebunan Kopi Di Kabupaten Jember*" merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian yang dilakukan melalui proses penggalian data yang dihimpun untuk menemukan gambaran model pembangunan masyarakat yang tepat untuk meningkatkan keberdayaan perempuan berbasis kelembagaan masyarakat yang sesuai dengan sistem sosial ditingkat lokal. Penelitian memperoleh temuan awal, adanya Kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat dan memiliki potensi untuk meningkatkan keberdayaan perempuan dan laki-laki dalam rangka memenuhi kebutuhan praktis dan strateis gender diranah public dan domestik. Selain itu perempuan telah memiliki keberdayaan di tingkat publik dan domestik, akan tetapi perlu adanya pengembangan untuk mewujudkan kesadaran kritis perempuan buruh perkebunan. Mengingat, banyak intervensi perusahaan dan laki-laki dalam rumah tangga yang pada akhirnya menghambat keberdayaan perempuan buruh.

8.2 Saran

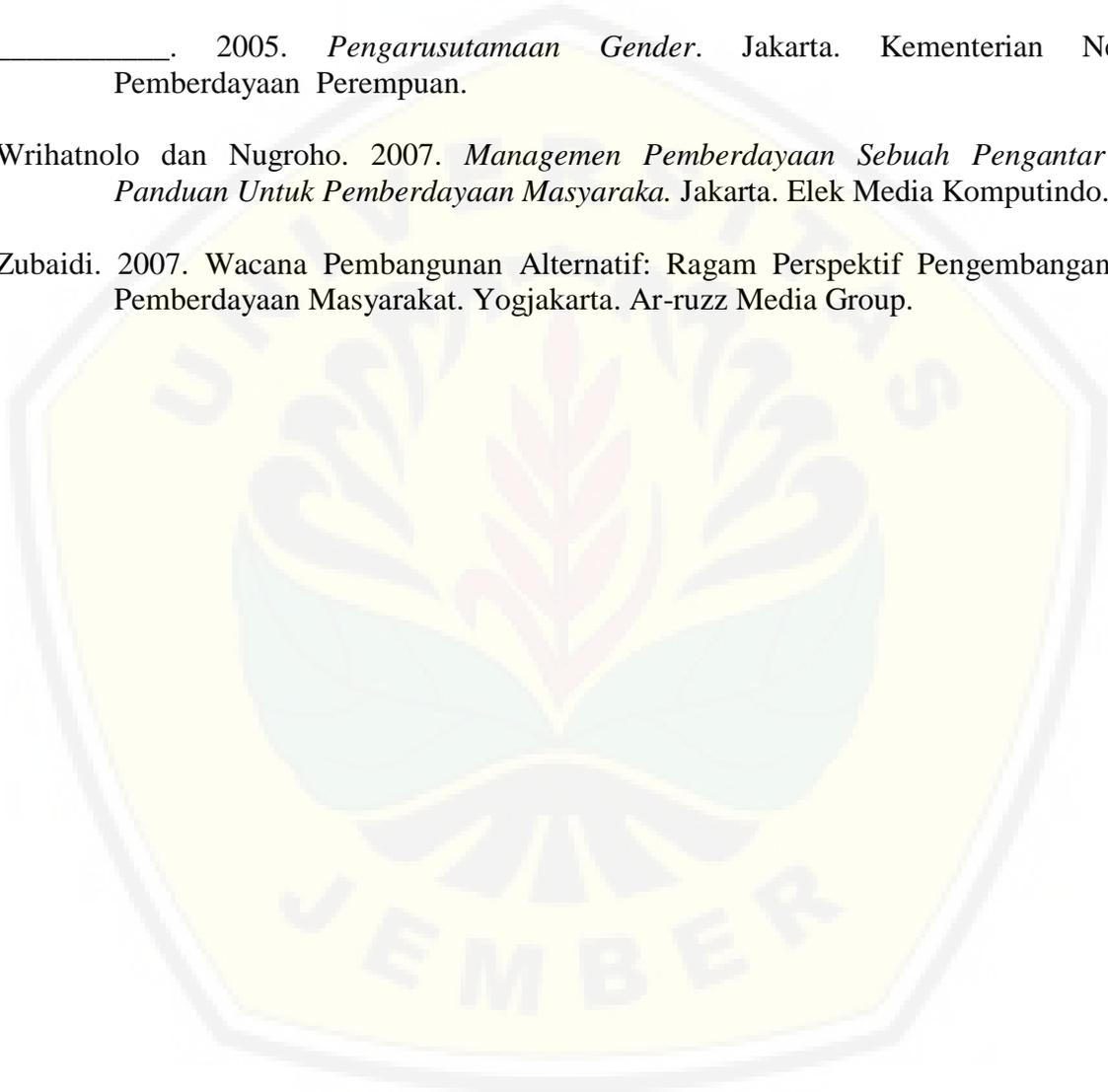
Namun demikian adanya waktu yang disediakan akan dimanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan penelitian ini dan memperoleh hasil yang maksimal dengan mengolah data yang telah dihimpun oleh tim peneliti dan tenaga lapang. Harapannya penelitian ini menghasilkan luaran yang bermanfaat dalam kajian akademis maupun bagi perencana pembangunan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan secara tepat.

Untuk itu, saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini, bahwa para pemangku kepentingan yang tergerak untuk melakukan aksi dalam mengentas kemiskinan, tidak seharusnya mengabaikan karakteristik masyarakat di tingkat lokal. Dimana karakteristik tersebut telah melembaga dan menjadi system social di tingkat masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Andrijani. 2003. *Analisis Gender dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. Dalam Perenpuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan*. Bandung. Akatiga.
- Cleves, J. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. 2006. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Handayani dan Sugiarti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang. UMM Pers.
- Ife dan Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Peet, R. 1999. *Theories of Development*. London. The Guilford Press.
- Mahardika, T. 2006. *Strategi Membuka Jalan Perubahan*. Yogyakarta. Pondok Edukasi.
- Mikkelsen. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Narayan, D. 2005. *Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspective*. Washington, DC. The Word Bank.
- Peet, R. 1999. *Theories of Development*. London. The Guilford Press.
- Ritzer dan Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Prenada Utama.
- Sariono. 2002. *Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Manggarai Propinsi NTT*. Yogyakarta. Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Singarambun dan Effendi. 1985. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Smith, W. 2008. *Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Soekanto, S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strtegis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan sosial*. Bandung. PT Refika Aditama.

- Sulistiyani, A . 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gaya Media.
- Sudin. 2006. *Peningkatan Kapasitas Sosial Perempuan melalui Kelompok UEP di Kecamatan Pulau Ternate*. Yogyakarta. Tesis Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyanto. 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta. Global Pustaka Utama.
- Tjokrowinoto, M. 2004. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- _____. 2005. *Pengarusutamaan Gender*. Jakarta. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Wrihatnolo dan Nugroho. 2007. *Managemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. Elek Media Komputindo.
- Zubaidi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Ar-ruzz Media Group.



Lampiran: 1

INSTRUMEN PENELITIAN

Variabel	Indikator	Data yang diraih
Program Keaksaraan	Pendampingan/ penyelenggara	1. Lembaga yang potensial untuk menyelenggarakan KF 2. Peran pendampingan/ penyelenggara 3. Struktur penyelenggara
	Pendanaan	1. Esensi pendanaan 2. Sumber pendanaan 3. Pengelolaan dana
	Kelompok Belajar	1. Dasar pembentukan kelompok belajar 2. Peran kelompok belajar 3. Keberlanjutan kelompok
Kelembagaan Lokal	Kelembagaan Ekonomi	Pranata ekonomi yang potensial untuk meningkatkan keberdayaan perempuan
	Kelembagaan Sosial	Pranata sosial yang potensial untuk meningkatkan keberdayaan perempuan
	Kelembagaan Agama	Pranata agama yang potensial untuk meningkatkan keberdayaan perempuan
	Kelembagaan Politik	Pranata politik yang potensial untuk meningkatkan keberdayaan perempuan
Keberdayaan perempuan buruh perkebunan	Akses	Sumber informasi yang diterima perempuan
	Partisipasi	Sumbangan yang diberikan perempuan diranah public dan domestic
	Kontrol sosial	Kemampuan kontrol perempuan ditingkat publik dan domestik
	Kesetaraan	Kesetaraan yang diterima perempuan diranah public dan domestik

PEDOMAN WAWANCARA

1. Program Keaksaraan Fungsional

1. Lembaga apa saja yang keberadaannya telah terorganisir dan terdapat di perkebunan?
2. Apa kelebihan dari lembaga tersebut?
3. Seandainya terdapat program KF, apa kriteria pendamping yang cocok mendampingi masyarakat perkebunan?
4. Bagaimanakah hubungan penyelenggara dengan perusahaan?
5. Sejauhmanakah pentingnya dana untuk program KF?
6. Seandainya terdapat program KF, darimana sumberdana berasal?
7. Bagaimana cara mengelola dana program KF
8. Bagaimana cara membentuk kelompok belajar
9. Apa saja peran kelompok belajar
10. Bagaimana mengatur keberlanjutan kelompok belajar

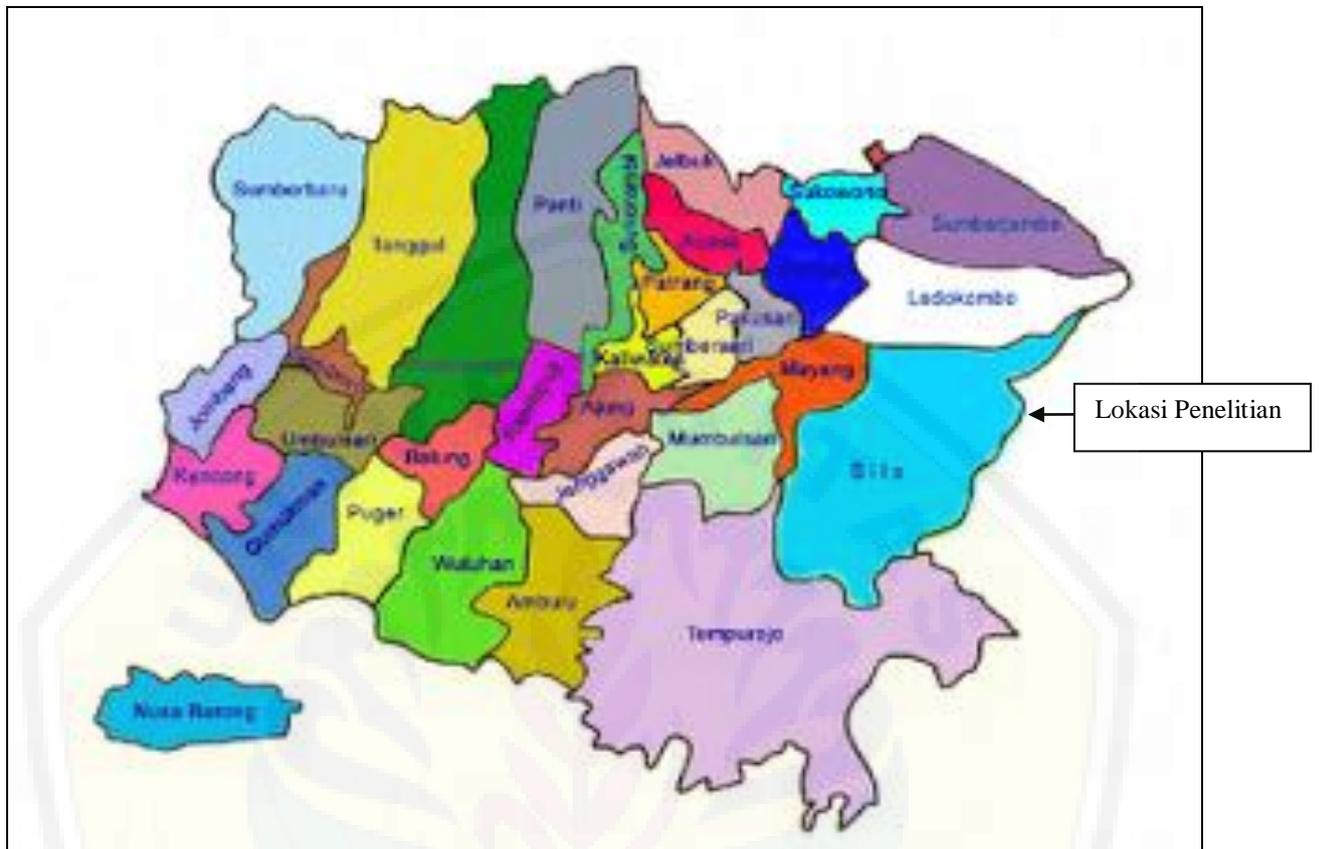
2. Kelembagaan Lokal

- a. Pranata ekonomi apa saja yang terdapat di perkebunan dan potensial untuk meningkatkan keberdayaan perempuan, serta bagaimana model dan keberlakuan pranata tersebut?
- b. Pranata agama apa saja yang terdapat di perkebunan dan potensial untuk meningkatkan keberdayaan perempuan, serta bagaimana model dan keberlakuan pranata tersebut?
- c. Pranata politik apa saja yang terdapat di perkebunan dan potensial untuk meningkatkan keberdayaan perempuan, serta bagaimana model dan keberlakuan pranata tersebut?
- d. Pranata sosial apa saja yang terdapat di perkebunan dan potensial untuk meningkatkan keberdayaan perempuan, serta bagaimana model dan keberlakuan pranata tersebut?

3. Keberdayaan perempuan buruh perkebunan

- a. Dari mana saja informasi yang diperoleh perempuan terkait dengan sumber-sumber kehidupan?
- b. Bagaimanakah sumbangan perempuan diranah publik?
- c. Bagaimanakah sumbangan perempuan di ranah domestik?
- d. Bagaimanakah kontrol perempuan diranah public?
- e. Bagaimanakah kontrol perempuan diranah domestik?
- f. Bagaimanakah pengakuan masyarakat terhadap kesetaraan perempuan dan laki-laki diranah public?
- g. Bagaimanakah pengakuan masyarakat terhadap kesetaraan perempuan dan laki-laki diranah domestik?

PETA KECAMATAN SILO



Lampiran 2.

PERSONALIA TENAGA PENELITI BESERTA KUALIFIKASINYA

No	Nama	Jabatan Dalam Penelitian	Kualifikasi dalam Penelitian
1	Dra. Hj. Khutobah., M.Pd	Ketua	Analisis Data
2	Drs. Misno AL., M.Pd	Anggota 1	Analisis Data
3	Deditiani Tri Indrianti., S.Pd	Anggota 2	Kolektor Data
4	Bayu Adi Laksono	Tenaga Lapang	Pengumpul Data
5	Lusy Setiyowati	Tenaga Lapang	Pengumpul Data
6	Rifai	Tenaga Lapang	Pengumpul Data



FOTO KEGIATAN



Foto 1: Peneliti sedang menggali informasi dengan perempuan buruh PDP Sumberwadung



Foto 2: Anggota Peneliti menggali informasi tentang aktivitas pekerja perkebunan



Foto 3: Penggalian informasi yang dilakukan oleh ketua peneliti



Foto 4: Kondisi sarana transportasi di PDP Sumberwadung